

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kompetensi

Sadiyo

Abstract: Globalization era affects educational fields. A change in the 1994 curriculum is needed. The civic education curriculum should emphasize quality education through the achievement of basic competency, national standard and professional services to produce graduates who are religious, healthy, civilized, well-behaved, hard-working, knowledgeable, high-technology-masters and dedicated to the nation. The curriculum mission developed can increase the instructional implementation by developing reference, instructional guidance and educational infrastructure, develop a basic competency to increase the educational quality, and develop curriculum diversification and decentralization.

Kata kunci: kurikulum, kompetensi dasar, pendidikan kewarganegaraan.

Tidak ada satu bentuk kurikulum yang dapat diberlakukan dan dibakukan secara permanen. Perubahan suatu kurikulum pada hakikatnya merupakan akibat adanya perubahan paradigma yang dapat disebabkan antara lain oleh berubahnya orientasi pemerintahan, berkembangnya nilai-nilai sosial, budaya dan politik baru, dan berubahnya nilai-nilai kesejajaran dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Semua bentuk perubahan yang akan dilakukan terhadap suatu kurikulum seyogianya mengacu kepada pertanyaan mendasar, yaitu apakah perubahan kurikulum mengubah masa depan yang lebih baik?

Sadiyo adalah dosen Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Untuk mengubah suatu kurikulum diperlukan adanya suatu evaluasi ataupun pemantauan yang sifatnya berkala. Evaluasi ataupun pemantauan tersebut akan menjadi bukti empiris, baik untuk mengubah landasan atau basis pengembangan kurikulum, maupun penambahan atau pengurangan substansi yang ada. Evaluasi dan pemantauan dapat didasarkan atas data atau informasi primer ataupun data atau informasi sekunder. Usulan untuk mengubah kurikulum 1994 bukan tanpa dasar sama sekali. Sejak kurikulum 1994 diimplementasikan, telah dilakukan berbagai kajian terhadap isi dan pelaksanaan kurikulum yang bersangkutan. Kajian tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk evaluasi terhadap kurikulum yang dimaksud (Permana, 2000).

Berdasarkan kajian dimaksud, terdapat berbagai temuan yang dapat dijadikan landasan pendukung untuk mengusulkan dilakukannya perubahan terhadap kurikulum 1994 (Pusat Kurikulum, 1999). Kurikulum dianggap belum cukup mampu mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi berbagai persaingan global serta tantangan dan perubahan masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini atau yang mungkin terjadi di masa mendatang. Muatan kurikulum cenderung dinilai sarat sehingga kurang memungkinkan terwujudnya pembelajaran yang optimal; keseratan tersebut merujuk pada tidak berfokusnya materi yang ada dalam kurikulum sesuai dengan fondasi keilmuan. Tujuan kurikulum cenderung dinilai kurang jelas arahnya karena belum jelasnya kompetensi dasar dan misi yang akan dicapai. Tuntutan kurikulum dinilai terlalu tinggi bagi sebagian besar peserta didik sehingga hanya sebagian kecil peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang selaras dengan tuntutan tersebut. Hasil belajar cukup rendah, yang diduga berkaitan dengan rendahnya penguasaan kompetensi dasar peserta didik. Masih terdapat kompetensi-kompetensi yang diajarkan yang sesungguhnya bukan merupakan kompetensi dasar sehingga tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan baik pada masa kini maupun masa mendatang. Tujuan dan profil lulusan pada satuan pendidikan tertentu dinilai masih bersifat dualisme yaitu mempersiapkan anak didik ke masyarakat dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Penjurusan cenderung dinilai kurang didasarkan atas pemikiran-pemikiran yang bersifat keadilan dan kesesuaian. Materi-materi yang dianggap pokok/esensial ternyata banyak yang belum dimasukkan ke dalam kurikulum (Djamil, 2000).

KURIKULUM MASA DEPAN

GBHN 1999 menegaskan perlunya diversifikasi kurikulum yang dapat melayani keanekaragaman kemampuan sumberdaya manusia, kemampuan siswa, sarana pembelajaran, dan budaya di daerah. Diversifikasi kurikulum menjamin hasil pendidikan bermutu yang dapat membentuk masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, dan berdaya saing untuk maju dan sejahtera. Atas desakan perubahan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan kurikulum merupakan suatu keharusan. Persoalan-persoalan yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara dan paradigma lama. Kurikulum perlu membuka peluang berupa cara-cara dan wawasan baru.

Untuk mewujudkan hasil pendidikan bermutu, diperlukan kompetensi dasar tamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional, dan global. Peningkatan mutu pendidikan secara nasional memerlukan standar mutu pendidikan nasional yang memuat kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, melalui kurikulum masa depan yang berdiversifikasi, keanekaragaman kemampuan daerah dilayani dengan berpijak pada standar nasional kompetensi dasar tamatan. Fokus kurikulum masa depan adalah siswa yang beriman, sehat, mandiri, berbudaya, berakhlak mulia, beretos kerja, berpengetahuan dan menguasai teknologi, serta cinta tanah air. Untuk mewujudkan siswa dengan ciri-ciri tersebut perlu dikembangkan kurikulum masa depan berdasarkan aspek-aspek berikut ini.

Diversifikasi Kurikulum. Corak kurikulum harus dapat mengakomodasikan berbagai perbedaan siswa, lingkungan, dan budaya. Dengan diversifikasi kurikulum dapat dikembangkan kurikulum inklusif yang mengakomodasikan pemerataan mutu dan kesempatan belajar yang bermakna melalui penyelenggaraan pendidikan yang produktif, interaktif, belajar mengajar yang bervariasi dan kesempatan mengekspresikan keanekaragaman gagasan. Keinklusan kurikulum ini memaksimalkan pencapaian hasil belajar karena dapat memberdayakan semua potensi yang digali dari kemajemukan sumberdaya alam, budaya, etnis, dan kekuatan lainnya.

Standar Nasional. Standar nasional berisi kerangka tentang ihwal yang harus diketahui, dilakukan, dan dimahirkan oleh siswa pada setiap tingkatan. Kerangka ini disajikan dalam bentuk pengembangan penguasaan ilmu-ilmu dasar dengan sistematika keilmuan dan kebenaran materi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Standar ini juga disertai dengan standar

kemahiran keterampilan dan pembentukan akhlak mulia yang mengutamakan terbentuknya sistem nilai komprehensif untuk mewujudkan pembentukan manusia Indonesia yang berkepribadian dan beretos kerja. Standar nasional mempunyai visi untuk mewujudkan pendidikan unggul dan merata bagi semua.

Kurikulum Berbasis Kompetensi Dasar. Kurikulum disusun dengan kekinian dan kemasadepanan. Oleh karena itu, kurikulum harus relevan, fleksibel, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun publik. Pertanggungjawaban ini menuntut kejelasan orientasi kurikulum, yakni lebih pada hasil belajar daripada prosedur pembelajaran. Dengan orientasi ini ditetapkan kompetensi dasar siswa pada setiap jenjang pendidikan, yang dapat dicapai melalui berbagai cara sesuai dengan keadaan sekolah/daerah.

Partisipasi Masyarakat. Segala potensi yang ada dalam masyarakat perlu dibangkitkan untuk mendukung terciptanya pendidikan yang bermutu. Perkembangan kehidupan masa kini dan yang akan datang menuntut di satu pihak kesadaran masyarakat agar berperan serta secara aktif dalam proses pendidikan, di lain pihak menuntut kesiapan sekolah agar membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan program pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah. Pencapaian pendidikan yang bermutu menuntut pengembangan sekolah secara profesional. Keprofesionalan ini sejalan dengan pemberian kewenangan sekolah dalam mengambil keputusan untuk penyelenggaraan program pendidikan yang berorientasi pada standar nasional. Standar ini dapat dicapai melalui cara yang dipilih oleh sekolah secara mandiri, khususnya dalam pengelolaan kurikulum.

Pilar Pendidikan Kesejahteraan. Landasan pembaharuan pendidikan global menggali dan memperdayakan potensi dan bakat-bakat anak yang terpendam yang meliputi empat pilar, yaitu *learning to be*, *learning to know*, *learning to do*, dan *learning to live together* (Pusat Kurikulum, 2000).

TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pembaharuan kurikulum memerlukan berbagai tahap kegiatan sebagai berikut. Pertama, penentuan filosofi pengembangan kurikulum. Pada tahap ini dibahas rasional pengembangan kurikulum. Sehubungan dengan hal itu, keterlibatan berbagai unsur yang memiliki kepedulian dan tanggung

jawab tentang kurikulum menjadi sangat vital, misalnya tokoh-tokoh masyarakat, anggota legislatif, pengamat pendidikan, dan praktisi. Kedua, penyusunan buram kurikulum. Pada tahap ini kegiatan mencakup antara lain penentuan standar kompetensi, penentuan standar materi pelajaran pokok, dan penentuan indikator penilaian hasil pembelajaran. Ketiga, uji coba kurikulum. Melalui uji coba tersebut setidaknya-tidaknya terdapat masukan yang mencakup kesesuaian kompetensi atau materi yang ditetapkan, dan kelayakan kompetensi atau materi dengan situasi dan kondisi daerah. Keempat, penyempurnaan kurikulum yang dikembangkan. Pada tahap ini para pengembang kurikulum membenahi konsep kurikulum apabila pada tahap uji coba ditemukan berbagai usulan atau kendala yang menyebabkan ketidaklancaran penerapan buram kurikulum yang telah disusun. Penyempurnaan ini mengurangi berbagai kritikan atau ketidaksepahaman antara berbagai pihak baik praktisi, pengamat maupun teoretisi terhadap berbagai paradigma perubahan yang mungkin terjadi. Kelima, diseminasi. Pada tahap ini kurikulum sudah ditetapkan sebagai suatu kebijakan umum yang berimplikasi adanya penerapan dalam skala luas. Adanya kebijakan umum dimaksud berarti bahwa kurikulum tersebut menjadi acuan bagi sekolah-sekolah. Keenam, evaluasi dan pemantauan secara berkala. Melalui evaluasi dan pemantauan diharapkan akan dapat diperoleh berbagai kemungkinan adanya perubahan lain baik yang sifatnya insidental maupun permanen. Kegiatan ini memiliki arti penting untuk pengambilan kebijakan mengubah atau menyempurnakan suatu kurikulum yang berlaku.

ARAH KOMPETENSI DASAR, STANDAR MATERI DAN INDIKATOR

Seperti diuraikan pada tahap-tahap perkembangan di atas, arah kompetensi dasar, standar materi dan indikator bersifat divergen. Divergensi ini dimulai dari kompetensi dasar kemudian menentukan standar materi dan menentukan indikator. Kemampuan dasar melukiskan apa yang harus diketahui oleh semua siswa dan dapat dilakukan oleh siswa tersebut pada kelas tertentu. Artinya, kemampuan dasar adalah kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti pendidikan pada kelas tertentu. Deskripsi kemampuan dasar merupakan satu kalimat yang mengandung *skills* dan materi dari masing-masing mata pelajaran, yang meliputi *thinking*, *cognitive skills*, *social/emotional skills*, *motoric skills* atau *moral skills*. Kemampuan dasar pada masing-masing kelas harus mampu dibedakan

dengan kelas yang lain. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan *skill* ataupun perbedaan isinya.

Standar materi melukiskan isi, konsep-konsep khusus dan/atau *skills* untuk mengembangkan kompetensi dasarnya. Dengan perkataan lain, standar materi tersebut merupakan informasi apa yang harus diajarkan guru kepada siswanya dari suatu topik. Indikator penilaian melukiskan apa yang dapat ditunjukkan atau dijelaskan atau dijawab siswa setelah mereka memperoleh suatu kemampuan terhadap suatu topik.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dewasa ini mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sudah tidak sesuai dengan era reformasi. Berbagai sebutan yang disandang oleh mata pelajaran PPKn antara lain mata pelajaran yang memuaskan dengan akibat perlu dihapus dari kurikulum, mata pelajaran yang menjemukan karena pokok bahasan yang selalu diulang-ulang sehingga perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan GBPP-nya, dan mata pelajaran yang dipaksa tumpang-tindih dengan pelajaran Pendidikan Agama, Tata Negara, dan Sejarah yang untuk mengatasinya diperlukan penegasan hakikat substansinya (Cahyoto, 1999).

Perkembangan kehidupan politik bangsa dalam era reformasi menyebabkan timbulnya jargon politik yang perlu diperhatikan dalam mata pelajaran PPKn agar siswa dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Istilah-istilah yang harus dipahami oleh siswa dalam mata pelajaran PPKn antara lain adalah masyarakat madani, oposisi, *power sharing*, koalisi dan aliansi politik. Sementara itu, dalam praktik kehidupan bernegara berdasarkan ketetapan MPR telah ditekankan pula pelaksanaan HAM, hasil amandemen terhadap UUD 1945, terbuka terhadap kritik, dan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemerintah Persatuan Nasional sebagai hasil Pemilu 1999 telah berusaha merangkul dan mewadahi kepentingan partai politik dan golongan dalam masyarakat untuk ikut serta mengantarkan bangsa Indonesia ke bentuk masyarakat madani dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Serba keterbukaan dan kebebasan mengemukakan pendapat akhirnya mengundang sekelompok orang dalam masyarakat untuk menyatakan minat dan kebutuhan dalam pengurusan wilayah, yang secara berlebihan telah melahirkan tuntutan negara federal dan negara merdeka, terpisah dari Negara Kesatuan RI, tanpa mempertimbangkan pengalaman otonomi daerah seluas-luasnya

(Cahyoto, 1999). Akibatnya, sekelompok anggota masyarakat di wilayah tertentu saling berusaha memusuhi dan bahkan membunuh serta mengusir suku pendatang, konflik agama, kepentingan ekonomi dan politik, serta prasangka ras. Penyelesaian atas kekacauan ini terasa lamban dilakukan oleh pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dan keamanan untuk melindungi warga negaranya. Dalam kemelut itu peran PPKn tetap berlangsung dengan mengacu kepada Suplemen PPKn 1999 untuk ikut serta dalam arus reformasi. Para pelaksana kurikulumlah yang mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya karena tingkat kepercayaan kepada PPKn telah menurun dan pergeseran nilai moral yang berlangsung belum terangkap secara mantap dalam bentuk konsep dan prinsip sebagai bahan ajar.

Dalam suasana reformasi ini Ditjen Dikdasmen telah berupaya semaksimalnya menerbitkan suatu dokumen legal Penyempurnaan/Penyesuaian Kurikulum 1994 berupa Suplemen GBPP PPKn 1999. Hal baru yang ditandai dari suplemen ini adalah pengorganisasian bahan menggunakan pendekatan spiral meluas, proses pembelajaran dan materi yang berdimensi konflik atau kontroversi, pembahasan konsep, prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang ditekankan pada peran peserta didik, dan perwujudan nilai-nilai dan sikap sebagai landasan berperilaku dalam partisipasi sosial. Dalam praktik di sekolah ada kesenjangan antara pesan kurikuler dengan praktik pendidikan karena belum tersosialisasikannya suplemen ini di lingkungan sekolah, sehingga pesan tersebut saat ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh guru (Al Wiyono, 1999).

Dalam rangka mengisi reformasi dan agar mata pelajaran PPKn memenuhi harapan masyarakat, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh PPKn bagi proses pembelajarannya, yaitu penegasan tujuan pembelajaran PPKn untuk mewujudkan warga negara yang kritis dan loyal kepada bangsanya, kejelasan bidang keilmuan yang digunakan untuk pembahasan materi PPKn, pilihan strategi pembelajaran yang konsisten dengan materi, dan evaluasi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKn.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam rangka memperoleh kepercayaan dari masyarakat, pemerintah melalui Pusat Kurikulum telah menyusun rencana kurikulum baru untuk menggantikan PPKn yaitu *Pendidikan Kewarganegaraan*. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik dalam berpikir secara kritis,

rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; berpartisipasi secara bermutu serta bertanggung jawab, dan bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; membentuk diri berdasarkan karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis. Fungsi PKn dapat menjadi pengikat untuk menyatukan misi rakyat Indonesia yang beragam dari segi agama, bahasa, usia, dan suku bangsa tentang budaya kebersamaan yang dapat mendukung tetap berdirinya Republik Indonesia. Oleh karena itu, kewarganegaraan harus menjadi bahan utama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan pembelajaran yang sistematis, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan keterampilan intelektual dan partisipatori yang menghasilkan pemahaman tentang arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ruang lingkup kemampuan dalam PKn yang hendak diwujudkan melalui PKn dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kemampuan untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan, kemampuan untuk memiliki keterampilan kewarganegaraan, dan kemampuan untuk menghayati dan mengembangkan karakter kewarganegaraan.

Menurut NCSS (dalam Daroeso, 1987), melalui pendidikan kewarganegaraan, kaum muda dibantu untuk mencapai pemahaman mengenai tujuan nasional, kemaslahatan bersama, dan proses *self government*. Dari pernyataan itu jelas bahwa warganegara mendapat pengaruh-pengaruh yang positif dari bahan-bahan yang berasal dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di luar rumah dan sekolah. Dalam menyusun program *civic education* perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang dapat menolong siswa untuk mengetahui, memahami, dan mengapresiasi cita-cita nasional, serta dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai masalah pribadi, masyarakat dan negara. *Civic education* bertugas meluruskan, memperluas, menyehatkan, mengembangkan dan membina kontinum tersebut pada kualitas dan taraf yang lebih tinggi atau menunjukkan alternatif-alternatif jalan dan usaha ke arah itu menurut kriteria dan ukuran konstitusi.

PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

Dalam rangka mempercepat proses untuk menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa yang telah maju, perlu dipikirkan secara jernih sistem dan manajemen pendidikan yang lebih baik. Dunia pendidikan di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan besar, yaitu masih rendahnya peme-

rataan memperoleh pendidikan, masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, dan masih lemahnya manajemen pendidikan. Sistem pendidikan ke depan harus lebih baik dalam arti lebih transparan, demokratis, efektif, efisien, memperhatikan keragaman kebutuhan/keadaan daerah/peserta didik, serta melibatkan partisipasi masyarakat (Kompas, 29 Maret 2001). Untuk itulah pemerintah akan memberlakukan mata pelajaran PKn. Dalam pembelajaran PKn itu ada satu kegiatan yang dinamakan *Proyek Belajar Kewarganegaraan*. Proyek ini adalah suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik-empirik. Proyek ini pada hakikatnya merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, kelas, atau sekolah. Proyek Belajar Kewarganegaraan diharapkan dapat meminimalisasi kesenjangan antara teori dan praktik, karena ilmu bukan sekadar kekayaan intelektual saja tetapi juga mempunyai kegunaan praktis. Meskipun mengetahui kegunaan praktis ilmu, apabila tidak mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadi mubazir.

Proyek Belajar Kewarganegaraan dilaksanakan dalam bentuk intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendorong peserta didik untuk berpartisipasi sebagai warganegara yang efektif dan bertanggung jawab. Latihan berpikir kritis, kegiatan memecahkan masalah, dan teknik belajar kooperatif yang dibimbing guru dapat bermafaat bagi pelaksanaan Proyek Belajar Kewarganegaraan. Proyek Belajar Kewarganegaraan dapat dilakukan dalam suatu rangkaian kegiatan belajar yang terstruktur dan kooperatif. Proyek Belajar Kewarganegaraan dapat dilaksanakan dengan cara memilih satu atau lebih materi standar pada setiap catur wulan atau semester tertentu.

Proyek Belajar Kewarganegaraan di Sekolah Dasar untuk kelas I, II, dan III dapat dilakukan dengan penyelenggaraan permainan dan simulasi yang menarik, dapat merangsang proses berpikir dan pembiasaan untuk bersikap dan berbuat atau bertindak sesuatu yang baik, dan mengembangkan sikap positif terhadap lingkungan. Untuk kelas IV, V, dan VI proyek dapat dilakukan dengan membuat karangan, menganalisis suatu isu atau kasus yang dikutip oleh guru dari koran dan majalah, dan membuat laporan tertulis tentang suatu kegiatan atau peristiwa.

Proyek Belajar Kewarganegaraan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dapat dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi berkaitan dengan masalah,

menguji dan mengevaluasi pemecahan, memilih atau mengembangkan alternatif pemecahan yang diusulkan, dan mengembangkan rencana tindakan.

Projek Pelajar Kewarganegaraan untuk SMU/Kejuruan dapat dilakukan dengan pengaplikasian metode-metode ilmiah seperti metode pemecahan masalah (*problem solving*) dan metode inkuiri (*inquiry method*). Langkah-langkah metode pemecahan masalah adalah merumuskan masalah, membuat kerangka untuk pemecahan masalah, menentukan sumber data, mencari data, menaksir kelayakan data, memilih dan memasukkan data ke dalam kerangka, meringkas data, mengamati hubungan antara data, menafsirkan data, menyimpulkan hasil penafsiran, dan mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah. Langkah-langkah metode inkuiri adalah membuat fokus untuk inkuiri yaitu menyajikan masalah, merumuskan kemungkinan penyelesaian, mengumpulkan data, menilai penyelesaian yang diajukan, dan merumuskan kesimpulan.

Hasil pekerjaan peserta didik dari Proyek Belajar Kewarganegaraan setelah diberi nilai oleh guru pembimbing, selanjutnya ditampilkan di depan kelas. Peserta didik diberi sertifikat keberhasilan dalam mengikuti kegiatan proyek tersebut.

PENUTUP

Penerapan kurikulum baru sebagai pengganti Kurikulum 1994 memerlukan waktu pengkajian yang lama. Pengkajian dilakukan oleh Pusat Kurikulum kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Perlu ada sosialisasi yang cermat, mengingat hal tersebut masih baru serta berusaha menghilangkan *image* bahwa pergantian kurikulum terjadi karena adanya pergantian pejabat.

Berbagai keluhan telah disampaikan dari guru kepada pihak yang berwenang untuk mengadakan perubahan kurikulum 1994. Perubahan yang dikehendaki meliputi berulang-ulangnya materi yang ada dalam GBPP serta waktu yang rasanya terus dikejar-kejar untuk menghabiskan materi dalam GBPP. Di samping itu perubahan kurikulum juga dituntut karena perubahan masyarakat akibat globalisasi sehingga materi yang disajikan dalam GBPP sudah banyak yang ketinggalan.

Jika kurikulum baru dilaksanakan, akan bertiup angin segar dalam proses pembelajaran karena tersedia proyek belajar kewarganegaraan yang akan dapat menjembatani teori dan praktik dalam keadaan yang seimbang. Dengan demikian tidak terjadi jarak yang terlalu jauh antara teori yang

diberikan dengan praktik dalam lapangan, karena akan segera dicocokkan dalam masyarakat. Semua itu sangat tergantung pada pelaksanaan dalam proses nanti.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Wiyono, P. 1999. *Problematika dan Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran PPKn*. Makalah disajikan dalam Seminar Eksistensi PPKn pada Era Reformasi, Universitas Negeri Malang, 27 Oktober.
- Cahyoto. 1999. *Materi PPKn: Pembahasan dari Dimensi Proses Pembelajaran Berdasarkan Suplemen GBPP Mata Pelajaran PPKn*. Makalah disajikan dalam Seminar Eksistensi PPKn pada Era Reformasi, Universitas Negeri Malang, 27 Oktober.
- Cahyoto. 1999. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Dari Keterbatasan ke Keterbukaan Nilai Moral*. Makalah disajikan dalam Diskusi Panel dengan CISED, Universitas Negeri Malang, 29 Nopember.
- Daroeso, B. 1987. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Djamil. 2000. *Pengarahannya untuk Kurikulum Baru*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Kurikulum Baru, Jakarta, 26 September.
- Djamil. 2000. *Rasional Perubahan Kurikulum 1994*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Kompas. 29 Maret 2001. Pendidikan di Indonesia Terpuruk, hlm. 9.
- Permana. 2000. *Standar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum. 1999. *Buram Ke 4 Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum. 2000. *Prinsip-Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.